

**KAJIAN PENGATURAN IUS *CONSTITUTUM* AKIBAT HUKUM
TINDAKAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG SUDAH HABIS
MASA JABATANNYA DAN IMPLEMENTASINYA**

TESIS

Oleh:

**DENY PANJAITAN
2302190067**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**KAJIAN PENGATURAN IUS *CONSTITUTUM* AKIBAT HUKUM
TINDAKAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG SUDAH HABIS
MASA JABATANNYA DAN IMPLEMENTASINYA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh
gelar Magister Hukum (M. H.) Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**DENY PANJAITAN
2302190067**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Deny Panjaitan
NIM : 2302190067
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Kajian Pengaturan Ius Contitutum Akibat Hukum Tindakan Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Sudah Habis Masa Jabatannya Dan Implementasinya” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 12 Juni 2025



Deny Panjaitan
NIM: 2302190067



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**KAJIAN PENGATURAN IUS *CONTITUTUM* AKIBAT HUKUM TINDAKAN
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG SUDAH HABIS MASA
JABATANNYA DAN IMPLEMENTASINYA**

Oleh :

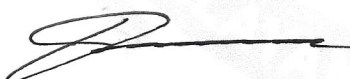
Nama : Deny Panjaitan
NIM : 2302190067
Program Studi : Magister Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 12 Juni 2025
Menyetujui,

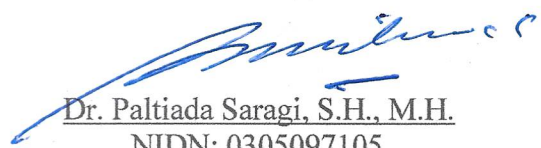
Pembimbing I

Pembimbing II

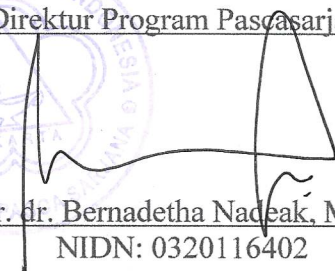

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
NIDN: 0020096802


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIDN: 0305097105

Ketua Program Studi Magister Hukum


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIDN: 0305097105

Direktur Program Pascasarjana


Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA
NIDN: 0320116402



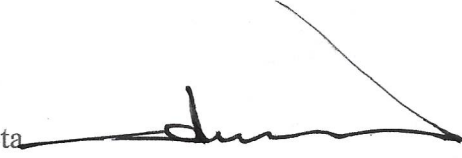
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 12 Juni 2025 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Deny Panjaitan
NIM : 2302190067
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Kajian Pengaturan ius *Contitutum* Akibat Hukum Tindakan Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Sudah Habis Masa Jabatannya dan Implementasinya” oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Paltiada Saragih, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA	Sebagai Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deny Panjaitan
NIM : 2302190067
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Kajian Pengaturan Ius *Contitutum* Akibat Hukum Tindakan Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Sudah Habis Masa Jabatannya dan Implementasinya

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 12 Juni 2025



Denny Panjaitan
NIM: 2302190067

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengaruniakan kekuatan, kesabaran dan kemampuan, serta pengetahuan kepada penulisan Tesis ini sehingga bisa menyelesaikannya dengan judul “**KAJIAN PENGATURAN IUS *CONSTITUTUM* AKIBAT HUKUM TINDAKAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG SUDAH HABIS MASA JABATANNYA DAN IMPLEMENTASINYA**”. Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Pascasarjana serta untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (MH UKI). Dari semua judul yang terpikir oleh penulis, akhirnya penulis memutuskan untuk memilih isu yang terkait dengan Pengaturan Ius Constitutum akibat Hukum Tindakan Direksi dan Dewan komisaris yang sudah habis masa Jabatannya dan Implementasinya. Ketika penulis memutuskan memilih judul dalam tesis ini, dan saat memulai penelitian penulis berhadapan dengan pergulatan batin yang hebat, dengan sebuah pertanyaan apakah tesis ini bisa menjadi sumbangan bagi sebuah kemajuan hukum di Tanah Air, secara khusus mendorong perhatian semua pihak. Penulis juga sadar betul, tesis ini masih jauh dari sempurna, karena ketika menulis tesis ini, penulis berada di tengah beban pekerjaan tinggi dan berbagai tanggungjawab, di tengah waktu yang sangat terbatas, serta kemampuan terbatas yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia dan dosen penguji.
2. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing I dan penguji.
3. Prof. Dr. dr. Bernadheta Nadeak, M.Pd., PA. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
4. Dr. Paltiada Saragi S.H., M.H., Selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, sekaligus Dosen Pembimbing II dan penguji.
5. Seluruh Dosen Pengajar di Program Studi Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas ilmu, wawasan, dan inspirasi yang diberikan selama masa perkuliahan.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, terima kasih atas kebersamaan, diskusi, dan semangat selama menempuh pendidikan.

7. Isteri tercinta dan anak-anak, keluarga dan sahabat terdekat menjadi penyemangat dalam menyelesaikan tesis dan studi di Universitas Kristen Indonesia.
8. Kepada Pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, terima kasih atas masukan dan dukungannya selama penulis melakukan penelitian ini.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan.

Jakarta, 12 Juni 2025

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4. Maksud dan Tujuan	7
1.4.1. Maksud Penelitian.....	7
1.4.2. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	8
1.5.1. Teori organ dalam badan hukum.....	9
1.5.2. Kerangka Konsepsional.....	12
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Originalitas Penelitian.....	15
1.8. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Kajian Pustaka Tentang Teori Hukum.....	18
2.1.1. Teori Organ Dalam Badan Hukum	18
2.1.2. Teori Kepastian Hukum	20
2.2. Perseroan Terbatas Sebagai Identitas Badan Hukum	23
2.3. Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Kajian Teori	29
2.3.1. Pengertian Perseroan Terbatas	29
2.3.2. Organ Perseroan Terbatas Dan Tugas serta Kewenangannya	32
2.3.1.1. Rapat Umum Pemegang Saham.....	33

2.3.1.2.Direksi	41
2.3.1.3.Dewan Komisaris	47
2.3.3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perseroan Terbatas	52
2.3.4. Keberadaan Perseroan Terbatas Perorangan	55

BAB III PENGATURAN KEBERADAAN DIREKSI DAN DEWAN

KOMISARIS PERSEROAN YANG TELAH BERAKHIR

MASA JABATANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF...	59
3.1. Pengaturan Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris	
Perseroan Terbatas Dalam Hukum Positif Indonesia	59
3.2. Kekosongan Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris akibat	
Kegagalan RUPS Dalam Mengganti Kepengurusan Perseroan.....	63
3.3. Upaya Mengatasi Kekosongan Kepengurusan Perseroan Terbatas	
Sebagai Akibat Berakhirnya Masa Jabatan Direksi dan Dewan	
Komisaris	65
3.3.1. Penyelenggaraan RUPS Keliling (Circular Resolution) ...	65
3.3.2. Penyelenggaraan RUPS Melalui Penetapan Pengadilan...	66

BAB IV AKIBAT HUKUM TINDAKAN DIREKSI DAN DEWAN

KOMISARIS PERSEROAN YANG SUDAH BERAKHIR

MASA JABATANNYA.....	71
4.1. Kewenangan dan Tangung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	
Dalam Kepengurusan Perseroan Terbatas	71
4.2. Konsep Pengaturan Pengurusan Perseroan Terbatas Sebagai Akibat	
Kekosongan Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris.....	81
4.3. Keabsahan dan Akibat Hukum Keputusan Direksi dan Dewan	
Komisaris Perseroan Terbatas Yang Telah Berakhir Masa	
Jabatannya Dari Perspektif Kepastian Hukum Bagi Kepengurusan	
Perseroan Terbatas	88
4.3.1.Keabsahan Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris	
Perseroan Terbatas Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya	
Dalam Menjalankan Kepengurusan Perseroan Terbatas ..	88
4.3.2. Akibat Hukum Berakhirnya Masa Jabatannya Direksi dan	
Komisaris Perseroan Dalam Kepengurusan Dari Perspektif	
Kepastian Hukum Sebagai Tujuan Hukum	91

BAB V PENUTUP	96
5.1. Kesimpulan	96
5.2. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98



ABSTRAK

JUDUL : KAJIAN PENGATURAN IUS CONTITUTUM AKIBAT HUKUM TINDAKAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG SUDAH HABIS MASA JABATANNYA DAN IMPLEMENTASINYA

Keberadaan Perseroan Terbatas sebagai pelaku usaha dalam meningkatkan kinerja perekonomian dalam dunia usaha sangat strategis dan menentukan. Bentuk badan usaha berbadan hukum seperti ini banyak diminati dalam masyarakat, terutama karena sifat pertanggung jawaban yang terbatas dari para pemegang saham jika terjadi kebangkrutan perusahaan, yang hanya sebatas besar saham yang dimilikinya, dalam arti harta kekayaan pemegang saham tidak ikut menanggung utang-utang perseroan. Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum yang dikualifikasikan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dalam melaksanakan kegiatannya diwakili oleh oragnya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Tidak jarang ditemui, anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan namun disisi lain, belum ada pengangkatan kembali dan/atau penggantian melalui RUPS. Hal ini akan menghambat jalannya operasional perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan. Dalaim kaitan inilah, beberapa permasalahan yang ingin dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturanya dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana akibat hukum dari tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik terhadap Perseroan maupun terhadap pihak ketiga.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian *juridic normative* dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah dan menganalisis kaidah-kaidah hokum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan Perseroan Terbatas. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data yang bersifat studi literatur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk Undnag Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia yang mengatur Perseroan Terbatas belum mengatur secara komprehensif terkait dengan status dan keberadaan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan belum ada pengangkatan kembali atau penggantiannya melalui RUPS, termasuk mengatur akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan sehingga sering seklai menjadi persoalan hukum dalam masyarakat.

Kata Kunci : Hukum Positif, Direksi dan Dewan Komisaris, Masa Jabatan Yang Berakhir

ABSTRACT

TITLE: A Study on the [Existing Legal Provisions](#) of the Legal Consequences of the Actions of Directors and Commissioners Whose Terms Have Expired and Their Implementation

The existence of Limited Liability Companies (LLCs) as business entities plays a strategic and crucial role in enhancing economic performance within the business sector. This form of legal entity is widely favored by the public, particularly due to the limited liability of shareholders in the event of corporate bankruptcy—meaning shareholders are only liable up to the value of their shares, and their personal assets are not held responsible for the company's debts. As a legal entity classified as a legal subject and bearer of rights and obligations, an LLC operates through its organs: the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors, and the Board of Commissioners.

In practice, it is not uncommon to encounter situations where members of the Board of Directors and the Board of Commissioners continue performing their functions despite the expiration of their terms of office as stipulated in the Articles of Association, without reappointment and/or replacement by the GMS. This situation may hinder the company's operations in achieving its objectives. In this context, this study addresses two main issues: how such situations are regulated under Indonesian positive law, and the legal consequences of actions and legal acts carried out by members of the Board of Directors and Board of Commissioners whose terms have expired, both for the company itself and for third parties.

This thesis employs normative juridical research, using a statute approach that examines and analyzes legal norms contained in legislation, particularly those concerning Limited Liability Companies. The data used are secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through literature study techniques.

The findings reveal that Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, along with Law Number 11 of 2020 on Job Creation, as components of Indonesia's positive legal system governing LLCs, do not comprehensively regulate the status and authority of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners whose terms of office have expired as per the Articles of Association and have not yet been reappointed or replaced by the GMS. Nor do they sufficiently regulate the legal consequences of legal acts performed under such conditions, which often give rise to legal uncertainty and disputes in practice.

Keywords: Positive Law, Board of Directors and Board of Commissioners, Expired Term of